

INPUT DAN PROSES PENGOLAHAN DATA NOMOR UNIK PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI LEMBAGA PENJAMINAN MUTU JAWA TIMUR

Fachmi Al Faroqi , 091714052

Program Studi Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya
Email: fachmialfaroqi@gmail.com

Karwanto

Program Studi Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya
Email: karin_haidar@yahoo.com

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan input data dan proses pengolahan data NUPTK di LPMP Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi partisipan, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Teknik keabsahan data dilakukan melalui kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa input data NUPTK di LPMP Jatim meliputi (1) Data yang dibutuhkan LPMP Jatim adalah profil individu guru dan profil sekolah. Input data berupa profil individu guru sering mengalami duplikasi data karena guru ada yang memasukkan data dua kali di sekolah yang berbeda. (3) waktu yang ditetapkan oleh pusat berkisar antara bulan juni hingga september di setiap tahunnya; (4) cara input data yang ditetapkan adalah jika PTK menginginkan penerbitan NUPTK baru maka diawali dengan PTK mengisi kuesioner permohonan NUPTK. Sedangkan hasil penelitian tentang proses pengolahan data NUPTK menunjukkan bahwa (1) Proses pengolahan data oleh pihak admin LPMP mengecek data pengajuan ke sistem, lalu menetapkan status diterima atau ditolak via sistem online. Urutan proses pengolahan data ini rentan menimbulkan kepanikan para guru karena penetapan status via online oleh para guru yang tidak mampu menggunakan komputer dianggap kurang mengakomodasi. (2) pihak yang bertugas untuk melakukan pengelolaan data di tingkat sekolah adalah admin sekolah yang ditunjuk/berkompeten. Jika di tingkat kecamatan maka UPTD yang mengelola kemudian diteruskan ke Dinas Kabupaten/Kota dan terakhir ke LPMP Jatim; (3) Pengolahan data dilakukan apabila berkas yang diajukan oleh PTK yang bersangkutan telah lengkap dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh LPMP Jatim dan Pusat; (4) Cara mengelola data terutama oleh LPMP Jatim adalah mengecek data pengajuan PTK ke sistem, memeriksa validitas dengan dokumen berkas syarat dan cek data ganda kemudian menetapkan status diterima atau ditolak via sistem online.

Kata Kunci: input, proses pengolahan data, nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan

ABSTRACT: This research purpose to describe the data input and processing of data in the LPMP Jawa Timur NUPTK. This study used a qualitative approach to the design of research case studies. Engineering data collection using in-depth interviews, participant observation, and study the documentation. Data analysis data reduction techniques, presentation of data, drawing conclusions and verification. Credibility, Transferability, data triangulation, Dependability and Confirmability. Research results related to data input NUPTK showed (1) the Data required is the individual profile Jatim LPMP teachers and school profile. Input data of individual teacher profiles often have duplication of data because the teacher there who enter data twice in different schools. (3) the time appointed by the Centre ranged between June and september in each year; (4) method of data input is assigned if a new NUPTK publishing wanted PTK then begins with the application of questionnaires filling NUPTK PTK. While the results of the research relating to data processing NUPTK showed (1) the process of data processing by the admin checking the LPMP data submission to the system, and then assigning the status of accepted or rejected via the online system. The order of processing this data is vulnerable to panic teachers raises because the assignment status via online by teachers who are not able to use a computer is regarded less accommodating. (2) the party who is responsible for the management of data at the level of the school is a designated school admin/advanced training. If at the level of the UPTD that manages the Sub then forwarded to the Office of district/city and last into the LPMP East Java; (3) data processing is done in the file submitted by the PTK is concerned has been complete and meets the criteria set forth by the LPMP Jatim and Center; (4) how to manage data mainly by LPMP Jatim is checking data filing system, to SUPPORT checking the validity of the document file is a binary data check terms and then setting status of accepted or rejected via the online system.

Keywords: input, processing of data, a unique number of educators and educational employee

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 41, menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib adalah pemerintah melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berkedudukan di Provinsi memiliki kewajiban untuk memfasilitasi PTK agar profesional dan bermartabat.

Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi yang telah diuraikan, LPMP Jatim sebagai UPT Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan yang berkedudukan di provinsi, lembaga ini mempunyai tugas membantu pemerintah daerah dalam bentuk supervisi, bimbingan, arahan, saran dan bantuan teknis kepada satuan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan non formal dalam berbagai upaya penjaminan mutu satuan pendidikan untuk mencapai standar nasional sebagaimana tercantum dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada pasal 1 nomor 24.

Berdasarkan PP Nomor 19 Tahun 2005, LPMP Jawa Timur harus memiliki data pendidikan dasar dan menengah

memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan (PTK), yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu. Implikasi amanat Undang-Undang tersebut Provinsi Jawa Timur baik formal maupun non formal yang *valid, reliable* dan *up to date* sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan baik di tingkat pusat maupun pemerintah daerah. Hal tersebut berfungsi untuk menjaga data tersebut selalu *valid, reliable* dan *up to date* setiap tahunnya, maka perlu dilakukan proses pemutakhiran data. Sebagai upaya mempercepat proses pemutakhiran data yang lengkap dan akurat mulai tahun 2012 proses pendataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) dikembangkan sampai dengan simpul kecamatan. Perluasan simpul pemutakhiran yang mendekati pada sumber data yaitu Sekolah dan PTK diharapkan dapat mempercepat pemutakhiran data tahun ini.

Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) merupakan kode identitas unik yang diberikan kepada seluruh pendidik (guru) dan tenaga kependidikan (staf) di seluruh satuan pendidikan (sekolah) di Indonesia. Dalam perkembangannya NUPTK menjadi syarat utama yang harus dimiliki oleh seluruh PTK Se-Indonesia untuk dapat mengikuti program-program Kementerian lainnya, antara lain sertifikasi, uji kompetensi PTK,

diklat PTK dan aneka tunjangan PTK lainnya. Begitu pula sebaliknya apabila NUPTK tidak dimiliki oleh PTK maka tidak dapat mengikuti program-program tersebut di atas dan berdampak terhadap kesejahteraan PTK.

Oleh karena itu LPMP Jatim yang bertugas melakukan monitoring, verifikasi dan konsolidasi di tingkat provinsi berperan penting untuk memastikan kesesuaian data masing-masing PTK agar tidak terjadi data ganda yang disebabkan antara lain karena guru pindah daerah tidak melapor, dan mengajukan NUPTK pada dua sekolah yang berbeda. Kondisi di atas diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 2 Mei 2013 kepada seseorang berinisial CH yang khusus menangani NUPTK sebagai berikut:

Permasalahan data ganda tersebut disebabkan berbagai faktor terutama karena PTK mengajukan NUPTK pada dua sekolah yang berbeda, pindah daerah dan lainnya.

Input dan proses NUPTK menjadi fokus perhatian yang perlu diamati secara mendalam karena menyangkut tugas LPMP Jawa Timur dalam melakukan verifikasi dan konsolidasi data di tingkat provinsi dalam bentuk *database* NUPTK. Data dari LPMP Jawa Timur menyebutkan pada tahun 2013 ada 36 orang yang mempunyai NUPTK bermasalah karena

NUPTK mereka sama dengan dengan PTK lain dari jumlah PTK Jawa Timur yang mencapai 72.000 orang. Verifikasi dan konsolidasi tersebut merupakan peran sentral LPMP Jatim untuk meminimalisir kesalahan pengolahan NUPTK yang dapat berdampak pada status PTK dalam pengurusan NUPTK.

Kesalahan dalam NUPTK berdampak pula terhadap peningkatan sumber daya manusia dalam hal ini PTK karena dengan adanya NUPTK, guru dan tenaga kependidikan dapat mengikuti program diklat, uji kompetensi dan mendapat tunjangan. Sebelum adanya NUPTK, guru dan tenaga kependidikan masih sulit untuk berkembang baik dari sisi pengembangan diri maupun finansial. Berkaitan dengan uraian di atas, maka NUPTK hadir menjawab berbagai persoalan di atas dengan peran sebagai stimulus PTK untuk mengikuti program-program yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia dan berfungsi sebagai syarat mendapat tunjangan.

Sehubungan dengan keunggulan seperti yang diuraikan di atas, peningkatan kinerja lembaga pendidikan sebagaimana LPMP Jatim maupun lembaga pendidikan lainnya mutlak diperlukan di masa mendatang terutama berkaitan dengan sistem informasi dan teknologi informasi yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana

pendukung tetapi lebih sebagai senjata utama untuk mendukung keberhasilan dunia pendidikan sehingga mampu bersaing di pasar global.

Menurut Husein (2006: 151), pada dasarnya informasi dalam konteks sistem informasi strategis yang digunakan manajemen pendidikan di semua lembaga pendidikan harus direncanakan dan diaplikasikan secara baik dan benar. Keakuratan informasi yang didapatkan oleh lembaga pendidikan mempunyai keuntungan yang besar yakni memberikan gambaran menyeluruh tentang organisasi, penggunaan data, mampu menjadi alat *positioning* lembaga di antara lembaga lain sejenis.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas maka peneliti membutuhkan penelitian lebih mendalam tentang input dan proses pengolahan data NUPTK yang diterapkan di sebuah institusi yang menaungi penyelenggaraan sistem pendidikan. Dalam hal ini peneliti mengambil obyek di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Timur. Melalui uraian tentang proses pengolahan data NUPTK yang ada di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, diharapkan menjadi titik tolak dalam menghasilkan informasi yang valid dan akurat berupa NUPTK yang baik dan ideal untuk menunjang kinerja *stakeholder*.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka fokus penelitian ini yaitu (1) Input data pada NUPTK di LPMP Jawa Timur dan; (2) Proses pengolahan data NUPTK di LPMP Jawa Timur

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif. Metode ini sebagai metode penelitian *naturalistic* karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (Sugiyono, 2010: 8). Penelitian ini menggunakan rancangan studi kasus yang dilakukan di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Timur. Seiddel (Bungin, 2008: 145) mengatakan analisis data kualitatif prosesnya berjalan yakni (a) mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri; (b) mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, menyintesiskan, membuat ikhtisar dan membuat indeksinya; (c) berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola, dan hubungan-hubungan dan; membuat temuan-temuan umum.

Rancangan penelitian ini diawali dari penyusunan pedoman pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Pedoman penelitian ini berisi tentang pertanyaan yang terfokus

pada kepemimpinan kepala sekolah dalam pengelolaan sarana prasarana dan usaha-usaha yang dilakukan dalam upaya peningkatan pengelolaan sarana prasarana. Data yang terkumpul dikelompokkan menurut jenis materi data sumber informan selanjutnya peneliti menganalisisnya menjadi sebuah pemaparan laporan yang kompleks. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Timur.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga cara yakni wawancara mendalam, observasi partisipan, dan studi dokumentasi. Teknik wawancara menurut Sugiyono, (2010: 138) adalah teknik yang digunakan untuk mengetahui hal-hal yang mendalam tentang responden. Sedangkan observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang terkumpul dari berbagai proses biologis dan psikologis. Penelitian ini juga dilengkapi dengan teknik pengambilan data dokumentasi sebagai penunjang data yang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) merupakan kode referensi utama untuk dapat mengikuti berbagai program pengembangan PTK yang dilaksanakan oleh Kemdikbud yakni sertifikasi, uji kompetensi, diklat, dan aneka tunjangan PTK lainnya dikelola oleh

PMPTK sejak tahun 2006 hingga 2010 kemudian pada tahun 2011 dikelola oleh BPSDMPK-PMP. Kegiatan input data NUPTK dilakukan setiap tahun karena berkaitan dengan pertumbuhan PTK baik secara Nasional dan Daerah yang meningkat dari tahun ke tahun. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Timur merupakan lembaga kedinasan dibawah Kementerian Pendidikan Nasional yang bertugas melakukan supervisi, pengarahan kepada kabupaten/kota.

Kegiatan input data NUPTK yang dikoordinasi dan dilaksanakan oleh LPMP Jatim membutuhkan data-data pokok dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi melakukan verifikasi dan konsolidasi data NUPTK di tingkat provinsi dari pemerintah dalam hal ini BPSMDK-PMP Kemdikbud adalah data individu guru atau profil individu guru dan profil sekolah secara lengkap dan diisi secara lengkap terutama data-data yang bersifat mandatori (Nama, Tempat Tugas, Riwayat Pendidikan, Tanggal Lahir, Data keluarga).

Proses pendataan profil individu guru sendiri memerlukan waktu yang cukup lama dan sumber daya manusia yang kompeten karena guru dan tenaga kependidikan masih membutuhkan pendampingan khusus dikarenakan keterbatasan kemampuan dan usia. Admin sekolah atau pihak kompeten yang ditunjuk

untuk bertugas mendampingi guru dan tenaga kependidikan sendiri masih banyak yang kurang cepat dan tanggap terhadap proses pendataan yang dapat berakibat pada kesalahan-kesalahan input data dan sebagainya.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Siagian (2005:15) yang menekankan pentingnya kemampuan memilih informasi apa yang akan disampaikan kepada siapa dan untuk kepentingan apa, berarti penerima informasi atau pihak yang mendampingi PTK dalam pendataan pun perlu memiliki kemampuan untuk melakukan seleksi agar kegiatan input tidak terjadi kesalahan perekaman data profil individu guru sekaligus profil sekolah.

Input data dilakukan oleh guru dan atau tenaga kependidikan mengajukan permohonan NUPTK baru baik yang berstatus kepegawaian PNS/CPNS maupun Non PNS/Honorer. Pelaksanaan input data oleh guru dan tenaga kependidikan ini menjadi tantangan tersendiri bagi yang bersangkutan dikarenakan kemampuan teknis guru dalam menginput data NUPTK masih minim, sebagian dari mereka bahkan tidak paham teknologi yang berakibat ketergantungan yang tinggi terhadap pendamping pendataan.

Berkaitan dengan hal tersebut, pada dasarnya guru dan tenaga kependidikan merupakan bagian sistem manusia yang

menyediakan data untuk diproses menjadi informasi sebagaimana diungkapkan oleh Davis (Bagad, 2009: 21) “ *MIS is an integrated user machine system for providing information to support operations, management and decision making functions in an organization*”. Jadi dapat dikatakan apabila guru dan tenaga kependidikan telah menjalankan fungsi sebagai suatu kesatuan dalam sistem manusia dengan baik dan benar maka data yang diberikan memiliki nilai guna tinggi dan minim kesalahan.

Guru dan tenaga kependidikan sebagai pihak yang menginput data juga harus mempertimbangkan jadwal input data yang ditetapkan oleh pusat berkisar yang antara bulan juni hingga september di setiap tahunnya. Jika PTK ingin mengajukan NUPTK baru maka pengajuan dimulai pada bulan juni dan untuk verifikasi dan validasi bagi PTK yang sudah mempunyai NUPTK dilakukan pada bulan september. Pelaksanaan input data sering mengalami data susulan yang disebabkan informasi yang didapatkan oleh PTK terkadang mendadak atau PTK sendiri yang kurang pro aktif dalam menggali informasi NUPTK. Berdasarkan pada kebijakan Kemdikbud bahwa setiap keterlambatan tidak diberikan dispensasi kecuali dalam keadaan sangat mendesak dan karena kesalahan pusat.

Penjelasan mengenai jadwal input data NUPTK di atas juga mempunyai keterkaitan dengan cara input data yang ditetapkan yakni jika PTK menginginkan penerbitan NUPTK baru maka diawali dengan PTK mengisi kuesioner yang didapatkan di website resmi Kemdikbud (<http://padamu.kemdikbud.go.id>)

kemudian ditandatangani oleh kepala sekolah dengan melampirkan (1) fotokopi akte kelahiran; (2) nomor NIK sesuai e-KTP; (3) fotokopi ijazah SD dan ijazah terakhir; (4) SK pengangkatan pegawai sesuai syarat; dan (5) SK pembagian jam mengajar empat tahun terakhir. Jika persyaratan di atas telah terpenuhi kemudian diserahkan ke admin Kabupaten/Kota untuk dilakukan persetujuan pada sistem dan mencetak tanda buktinya.

Sesuai dengan pernyataan Murdick dkk (Sutabri, 2005: 91) bahwa input data yang berorientasi pada sistem informasi adalah proses komunikasi dimana informasi masukan (input) direkam, disimpan, dan diproses untuk menghasilkan output. Output atau keluaran berupa NUPTK sudah seharusnya memiliki tingkat validitas yang tinggi karena jika hal itu tidak terpenuhi maka akan timbul kesalahan yang disebabkan berbagai hal yang menyangkut NUPTK bagi PTK sebagai contoh adanya guru

yang pindah daerah belum melapor dan sebagainya.

Kegiatan input data yang dikelola LPMP Jatim sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam melakukan verifikasi dan konsolidasi data di tingkat provinsi memiliki peran sentral yakni mencegah hal di atas terjadi. Pencegahan tersebut dapat diawali dengan proses input yang baik seperti menyerahkan data individu guru sesuai dengan data yang diminta kemudian dilengkapi persyaratannya dan pihak sekolah induk bagi guru melampirkan profil sekolah sebagai data pendukung.

Pendidik dan tenaga kependidikan selaku pihak yang melakukan input data berperan penting karena mereka yang menjadi pemohon NUPTK baru yang mengirimkan berkas-berkas yang diminta untuk diproses sesuai dengan jadwal yang ditetapkan yakni bulan Juni untuk pemohon NUPTK baru dan september untuk yang telah memiliki NUPTK.

Cara input data yang ditetapkan adalah jika PTK menginginkan penerbitan NUPTK baru maka diawali dengan PTK mengisi kuesioner yang didapatkan di website resmi Kemdikbud (<http://padamu.kemdikbud.go.id>)

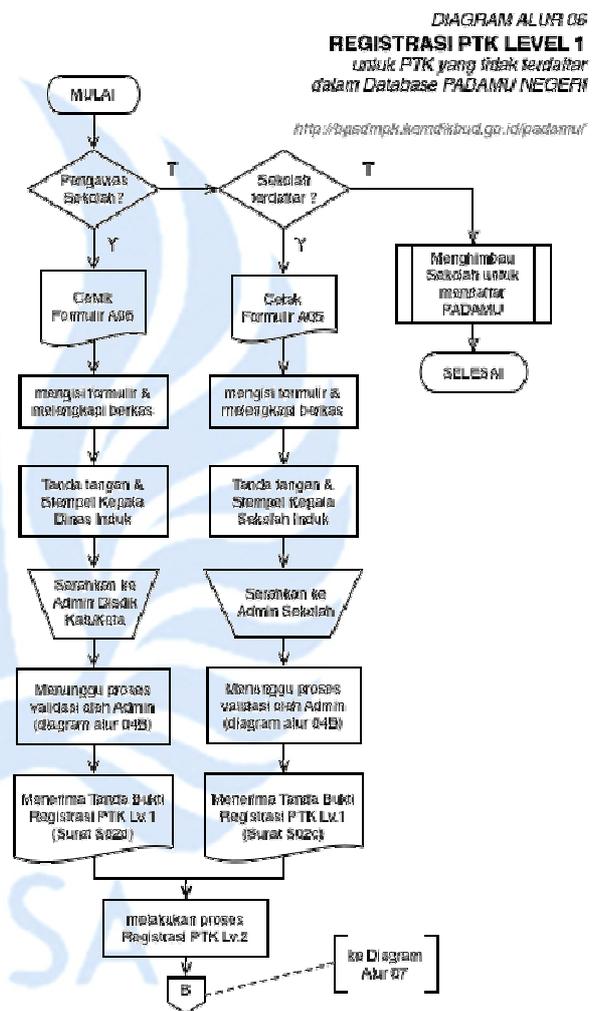
kemudian ditandatangani oleh kepala sekolah dengan melampirkan (1) fotokopi akte kelahiran; (2) nomor NIK sesuai e-KTP; (3) fotokopi ijazah SD dan ijazah terakhir; (4) SK pengangkatan pegawai

sesuai syarat; dan (5) SK pembagian jam mengajar empat tahun terakhir. Jika persyaratan di atas telah terpenuhi kemudian diserahkan ke admin Kabupaten/Kota untuk dilakukan persetujuan pada sistem dan mencetak tanda buktinya. Hal tersebut didasarkan pada standar input data sesuai dengan UU No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, standar input data berasal dari Undang-Undang yang dijalankan oleh BPSMDK-PMP.

Berdasarkan pada pembahasan di depan bahwa input data NUPTK terutama bagi guru yang belum memiliki NUPTK sebelumnya merupakan tahapan yang harus dilewati sebelum diproses lebih lanjut dengan menyerahkan berkas-berkas dimaksud dan diakhiri dengan mencetak tanda bukti persetujuan permohonan NUPTK. Alur permohonan NUPTK diawali dengan pengecekan status sekolah melalui NPSN, jika sudah terdaftar di Kemdikbud maka PTK dapat mengisi formulir A05 dan melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan.

Setelah berkas-berkas tersebut lengkap maka dilegalisasi atau ditandatangani oleh kepala sekolah disertai dengan stempel sekolah induk. Sekolah induk disini berlaku apabila PTK yang bersangkutan mengajar pada lebih dari satu sekolah. Langkah selanjutnya yakni berkas-berkas diserahkan ke admin sekolah

untuk diproses validasi yang ditunjukkan dengan tanda bukti registrasi PTK level 1. Alur registrasi PTK level 1 seperti tampak pada gambar di bawah ini.



Gambar 5.1 Alur Registrasi PTK Level 1
(Sumber: Dokumen LPMP Jatim 2013)

Berdasarkan pembahasan di atas diperlukan langkah-langkah optimalisasi oleh LPMP Jatim seperti menjalin kerjasama dengan cara mengadakan sosialisasi NUPTK secara bersama-sama

dengan Kementerian Agama selaku lembaga yang menaungi PTK yang mengajar di tingkat MI, MTs, dan Madrasah Aliyah. Perlu diketahui bahwa PTK di jenjang tersebut turut andil dalam data ganda karena PTK di jenjang ini kerap mengalami kebingungan yang akhirnya mereka mengurus permohonan NUPTK baru untuk kedua kalinya.

Langkah optimalisasi selanjutnya yakni menyediakan website khusus NUPTK, menyediakan fasilitas SMS Gateway yang menjadi media penghubung antara guru, admin sekolah dan LPMP Jatim, peran admin Kabupaten/ Kota dan UPTD diserahkan ke admin sekolah agar rantai birokrasi menjadi pendek, dan pihak LPMP membentuk forum komunikasi dengan admin sekolah yang nantinya menjadi rujukan utama informasi terbaru dari pemerintah pusat.

Proses pengolahan data NUPTK merupakan tahapan yang dilaksanakan setelah kegiatan input NUPTK dilakukan. Proses pengolahan data dilakukan oleh admin LPMP Jatim dalam hal verifikasi dan konsolidasi dengan admin Kabupaten/Kota. Berdasarkan pada temuan di lapangan yang didapatkan yakni proses pengolahan data dilakukan apabila PTK telah mencetak tanda persetujuan maka pihak admin LPMP mengecek data pengajuan ke sistem, memeriksa validitas dengan dokumen berkas syarat dan cek

data ganda lalu menetapkan status diterima atau ditolak via sistem online.

Pelaksanaan alur proses pengolahan data NUPTK ini terkendala berbagai hal seperti aplikasi Padamu Negeri terkadang mengalami gangguan teknis yang membutuhkan waktu cukup lama untuk perbaikan dan pengarsipan data di perangkat komputer admin LPMP relatif lambat dikarenakan telah terisi penuh sehingga membutuhkan ruang lebih. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Siagian (2005:16) bahwa salah satu manfaat dari berbagai alat penyimpanan informasi yang sarat teknologi ialah penghematan biaya penyimpanan, terutama karena tempat yang diperlukan tidak lagi merupakan ruangan yang besar. Di samping itu, dengan sarana berteknologi tinggi, keamanan informasi pun lebih terjamin.

Pelaksana alur proses pengolahan data di atas di tingkat sekolah adalah admin sekolah yang ditunjuk/berkompeten. Jika di tingkat kecamatan maka UPTD yang mengelola kemudian diteruskan ke Dinas Kabupaten/Kota dan terakhir ke LPMP Jatim. Pelaksanaan oleh pihak-pihak yang telah disebutkan di atas terkendala penjangnya rantai birokrasi yang harus melalui UPTD kecamatan dan Kabupaten/Kota yang berdampak pada kecepatan penerimaan berkas oleh LPMP Jatim. Kelly (Sutabri, 2005: 91) juga menjelaskan bahwa perpaduan sumber

daya manusia dan sumber daya yang berbasis computer bertujuan menghasilkan kumpulan penyimpanan, komunikasi, dan penggunaan data untuk tujuan operasi manajemen yang efisien.

Cara mengelola data terutama oleh LPMP Jatim adalah mengecek data pengajuan PTK ke sistem (berdasar kode pengajuan pada lembar tanda bukti pengajuan), memeriksa validitas dengan dokumen berkas syarat dan cek data ganda kemudian menetapkan status diterima atau ditolak via sistem online. Pelaksanaan pengolahan data di atas terkendala beberapa hal diantaranya PTK yang telah ditetapkan statusnya maupun yang belum akan mengalami kebingungan dikarenakan melalui sistem online. Sebagian dari PTK tersebut banyak yang tidak menguasai teknologi informasi yang akhirnya menyebabkan ketergantungan terhadap orang lain.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Lucas (1993: 279) bahwa ketika seluruh data telah dimasukkan, maka data tersebut biasanya diperiksa lagi (*key-verified*) untuk mengetahui adanya kesalahan pencatatan dalam hal ini masukan berupa data individu guru dan sekolah. Proses pengecekan data ke sistem ini merupakan bagian dari verifikasi yang dilakukan oleh admin LPMP Jatim dalam hal ini bagian pelayanan sistem informasi

yang menangani pengelolaan data dan PMP.

Proses verifikasi tersebut juga diperkuat dengan proses validasi yang dilakukan admin LPMP yakni memastikan bahwa data yang diberikan/diserahkan oleh PTK dan sekolah yang bersangkutan memenuhi kriteria kelengkapan berkas terutama data-data yang sifatnya mandatori (Nama, Tempat Tugas, Riwayat Pendidikan, Tanggal Lahir, Data keluarga) sebagaimana yang dijelaskan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan dikutip dari <http://bpsdmpk.kemdikbud.go.id> yang menjelaskan tentang pembatalan dan pengajuan kembali NUPTK yakni (1) PTK yang bersangkutan sudah tidak aktif lagi sebagai PTK karena sebagai sebab; (2) PTK yang bersangkutan memiliki lebih dari satu NUPTK dan; (3) PTK tidak mencantumkan data-data dengan benar, terutama untuk data-data yang sifatnya mandatori (Nama, Tempat Tugas, Riwayat Pendidikan, Tanggal Lahir, Data keluarga). Pembatalan NUPTK dapat dilakukan atas inisiatif pengelola NUPTK pusat dengan sebab salah satu di atas, atau karena usulan dari operator tingkat Provinsi (LPMP) atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Lucas (1993: 279) juga menjelaskan bahwa proses verifikasi ini dapat menunjukkan adanya

ketidakcocokan (*discrepancies*) yang kemudian dapat diperbaiki. Tahapan proses selanjutnya berupa pengecekan data ganda yakni proses membandingkan NUPTK PTK satu dengan NUPTK PTK yang lain melalui sistem *online* dengan cara mengakses ke <http://padamu.kemdikbud.go.id> melalui user admin.

Pengecekan ini merupakan tahapan penting yang menjadikan LPMP Jatim mempunyai peran sentral dalam hal verifikasi dan konsolidasi NUPTK di Kabupaten/Kota. Penetapan status diterima dan ditolaknya pengajuan NUPTK baru yang dilakukan PTK dilakukan secara *online* agar PTK yang bersangkutan dapat langsung melakukan pembenahan terhadap data yang diserahkan karena admin LPMP juga menyertakan alasan yang mendasari apabila data PTK ditolak agar dapat diperbaiki secepat mungkin dan diajukan kembali.

Proses penerbitan NUPTK adalah di Bagren Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan. Tim NUPTK Bagren akan mengolah data hasil verifikasi dan konsolidasi dari LPMP untuk kemudian diperiksa kembali keunikan data yang dikirim sebelum diterbitkan NUPTK. NUPTK yang telah diterbitkan oleh Bagren akan dikirim ke LPMP untuk

didistribusikan ke Dinas Pendidikan Kab/Kota wilayah masing masing.

Berkaitan dengan adanya data ganda PTK yang terjadi pada prinsipnya mutasi seorang PTK tidak menyebabkan NUPTK yang bersangkutan hilang atau berubah. Konsep ini yang harus diketahui oleh PTK secara baik dan benar untuk menjaga keakuratan data NUPTK. Kemanapun PTK tersebut pindah tugas, maka NUPTK akan tetap seperti semula. Oleh karena itu untuk guru yang telah mengalami mutasi harus melakukan langkah berikut yakni jika PTK mutasi ke instansi lain yang dalam satu Kabupaten/Kota maka PTK tersebut harus melapor ke operator SIM-NUPTK namun apabila PTK bersangkutan mutasi ke instansi lain berbeda Kabupaten/Kota pada provinsi yang sama atau berbeda maka PTK melapor ke operator SIM-NUPTK pada dinas Pendidikan Kabupaten/Kota asal, meminta cetak profil melalui SIM-NUPTK yang mencantumkan data-data lengkap PTK yang bersangkutan serta nomor NUPTK nya. Jika memungkinkan, PTK tersebut meminta database PTK yang bersangkutan dimuat dalam CD.

Langkah berikutnya PTK yang bersangkutan melapor kepada operator SIM-NUPTK di Dinas Kabupaten/Kota tujuan mutasi, dengan membawa data-data tersebut dan surat keterangan dari instansi tempat bertugas yang baru.

Petugas/Operator NUPTK Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota tujuan melakukan *import* data dari *database* yang dibawa PTK yang bersangkutan atau melakukan entri ulang namun harus diisi NUPTK yang bersangkutan pada kolom "NUPTK Pindahan".

Berkaitan dengan input dan proses NUPTK ini terdapat suatu korelasi yang erat satu sama lain antara input, proses dan output berupa NUPTK yakni dalam konsep sistem. Konsep ini menitikberatkan pada adanya keterkaitan satu sama lain di antara unsur-unsur yang ada dalam hal ini input, proses dan keluaran berupa NUPTK. Jika dalam keluaran berupa NUPTK terdapat adanya penyimpangan maka belum tentu kesalahan terjadi hanya di unsur keluaran saja tetapi akan dapat ditarik ke unsur sebelumnya yakni proses yang di dalamnya terdapat berbagai macam aktivitas yang menghasilkan keluaran.

Begitu pula apabila tidak ditemukan adanya penyimpangan di dalam proses maka dapat ditarik kembali pada input, apakah sesuai dengan prosedur atau tidak. Sistem sendiri secara sederhana didefinisikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel-variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling bergantung satu sama lain dan terpadu (Kumorotomo dan Margono, 1994:8).

Oleh karena itu dengan adanya konsep sistem yang saling berurutan dan melengkapi seperti telah dijelaskan di atas menjadi sarana untuk mengurangi atau meminimalisir penyimpangan dan kesalahan yang terjadi baik di tingkat awal, tengah, maupun akhir seperti digambarkan dalam siklus sistem

Berdasarkan pada pembahasan di atas maka proses pengolahan data NUPTK perlu ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitas dengan berbagai cara yakni dengan mengoptimalkan peran dan fungsi admin sekolah. Setiap data PTK harus melalui penyaringan admin sekolah yang diberi kewenangan menyortir data PTK melalui sistem online dan apabila ada kekeliruan atau ganda maka dapat langsung dikonfirmasi ke PTK yang bersangkutan. Setelah data diperbaiki maka hasil perbaikan diserahkan ke admin sekolah. Langkah optimalisasi selanjutnya yakni LPMP Jatim mengusulkan ke Kemdikbud agar fungsi pencetak NUPTK diserahkan ke LPMP Jatim.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan yaitu kegiatan input data bagi pemohon NUPTK adalah kegiatan mengumpulkan atau menyerahkan berkas yang dipersyaratkan oleh Kemdikbud melalui LPMP Jatim di tingkat

provinsi yakni meliputi data individu guru dan profil sekolah. Kegiatan input data ini mempunyai tahapan atau alur bagi PTK menginginkan penerbitan NUPTK baru. Input data NUPTK diperlukan untuk memenuhi prosedur permohonan NUPTK dan dibutuhkan guru untuk mengikuti program peningkatan kompetensi dan sekaligus kesejahteraan oleh Kemdikbud.

Proses pengolahan data NUPTK dilakukan apabila jika PTK telah mencetak tanda persetujuan maka pihak admin LPMP mengecek data pengajuan ke sistem, memeriksa validitas dengan dokumen berkas syarat dan cek data ganda lalu menetapkan status diterima atau ditolak via sistem online. Pengolahan data dilakukan apabila berkas yang diajukan oleh PTK yang bersangkutan telah lengkap dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh LPMP Jatim dan Pusat. Proses pengolahan data NUPTK ini dilakukan dalam rangka penerapan sistem pemetaan mutu pendidikan yang dicanangkan oleh pemerintah agar guru dan tenaga kependidikan dapat terfasilitasi dan meningkat kesejahteraannya. Berdasarkan temuan penelitian, pembahasan, dan kesimpulan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut.

Kegiatan input data NUPTK perlu meningkatkan kerjasama antar lembaga dalam hal ini Kementerian Agama yang notabene menaungi PTK dari Jenjang MI,

MTs, dan Madrasah Aliyah. Sosialisasi secara bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini LPMP Jatim akan meminimalisir adanya kesenjangan informasi yang selama ini menjadi penyebab kepanikan PTK.

Proses pengolahan data oleh LPMP Jatim membutuhkan penyaringan data secara berlapis yakni dengan bekerjasama dengan admin sekolah untuk menyortir data dan sekaligus mengecek keabsahan data melalui online. Dengan begitu data yang sampai ke LPMP Jatim sudah melalui penyaringan tahap awal yang dilakukan admin sekolah sehingga pihak LPMP Jatim melanjutkan pengecekan kembali sebelum diserahkan ke Kemdikbud pusat.

Berdasarkan paparan data, temuan penelitian, dan simpulan hasil penelitian, beberapa saran direkomendasikan kepada pihak LPMP Jatim yaitu Berdasarkan temuan penelitian, pembahasan, dan kesimpulan, maka peneliti memberikan saran yaoti kegiatan input data NUPTK perlu meningkatkan kerjasama dan kesepahaman antar lembaga dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama dan yang notabene menaungi PTK dari Jenjang MI, MTs, dan Madrasah Aliyah. Sosialisasi dan kesepahaman mengenai sistem NUPTK secara bersama-sama akan meminimalisir adanya kesenjangan informasi dan input

data yang selama ini menjadi penyebab kepanikan PTK.

Proses pengolahan data oleh LPMP Jatim membutuhkan penyaringan data secara berlapis yakni dengan bekerjasama dengan admin sekolah untuk menyortir

data dan sekaligus mengecek keabsahan data melalui online. Dengan begitu data yang sampai ke LPMP Jatim sudah melalui penyaringan tahap awal yang dilakukan admin sekolah sehingga pihak LPMP Jatim

DAFTAR RUJUKAN

- Amirin, M. Tatang. 2010. *Pokok-Pokok Teori Sistem*. Jakarta: Rajawali Pers
- Amiruddin. 2010. *Penerapan Association Rule Mining Pada Data Nomor Unik Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Untuk Penetapan Pola Sertifikasi Guru*. (Diakses tanggal 6 Oktober 2013 pukul 13.00)
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bagad, Vs. 2009. *Management Informations System*. India: Technical Publications
- Bungin, Burhan. 2008. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana
- Fatta, Hanif al. 2007. *Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Untuk Keunggulan Bersaing Perusahaan & Organisasi Modern*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Husein, Muhammad Fakhri dkk. 2006. *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Kumorotomo, Wahyudi dkk. 2009. *Sistem Informasi Manajemen Dalam Organisasi-organisasi Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Lingham, L. (2006). *Managing a business/ Management information system. All Experts*. Retrieved October 2, 2010 from <http://en.allexperts.com/q/Managing-Business-1088/management-information-system.htm> (Diakses tanggal 5 April 2013 pukul 19.05)
- Margono, S. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Moleong, Lexy. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: ROSDA
- McLeod, Schell. 2001. *Management Information System (Eighth Edition)*. US: Prentice Hall Inc.
- Nugroho, Eko. 2008. *Sistem Informasi Manajemen (Konsep, aplikasi, dan perkembangan)*. Yogyakarta: Andi Offset
- Parker, S. Charles. 1989. *Management Information System: Strategy and Action*. US: McGraw Hill
- Rochaety, Eti dkk. 2006. *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara
- Rhodes, J. 2006. *The Role of Management Information Systems in Decision Making.. Master's degree in nonprofit management from the University of Dallas*. (Diakses tanggal 5 April 2013 pukul 19.30)

Sagala, Syaiful.2009.*Memahami Organisasi Pendidikan*.Bandung:Alfabeta

Sugiyono.2010.*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.Bandung:Alfabeta

Siagian, Sondang.2005.*Sistem Informasi Manajemen*.Jakarta: Bumi Aksara

Sutabri, Tata.2005.*Sistem Informasi Manajemen*.Yogyakarta: Penerbit Andi

